

ABSTRAK

Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Kas Pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini untuk mengetahui penyusunan anggaran kas dan penyusunan laporan realisasi kas, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran kas dan realisasinya. Laporan Tugas Akhir membahas mengenai Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran dan Realisasi Kas pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Penyusunan anggaran kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditetapkan oleh Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun Tahap-tahap dalam penyusunan anggaran kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Penyusunan Anggaran (dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran berkenaan), Pengesahan atau Penetapan Anggaran (dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran berkenaan), Pelaksanaan Anggaran (berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran kas (dilakukan setelah Laporan Realisasi selesai dibuat). Realisasi anggaran kas Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara umum dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi/Perhitungan Anggaran yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan, tetapi ada saat realisasinya, serta ketiadaan standar belanja, program, dan kegiatan. Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang lebih terinci pada tiap SKPD.